

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

....., *Impelementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Achmad Ali, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, UNPAM Press, Tangerang, 2019.

Amgassussari Anugrahi Sangalang, *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2012.

Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Anonim, *Petunjuk Teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah*, Deputy Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, Jakarta, 2007.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Bernard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.

....., *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*, Djambatan Boedi, Jakarta, 1999.

....., *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.



Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.

....., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indosia (KBBI)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Effendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Evayani, *Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Barru*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Jhon Salihendo, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Julius Sembiring, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasinya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.

....., *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.



Oloan Sitrus, dkk, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, CV. Dasamedia Utama, Jakarta, 1995.

Rika Fitriani, *Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum UUPA*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Siti Rodhiyah, *Konsinyasi Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998.

....., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

....., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudawarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.



B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

C. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990.

D. Jurnal

Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Morality 2015.

Hotmaria Sariyani Silalahi, Dkk, “Analisis Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun)”, Volume 6, Nomor 4, Unes Law Review 2024.

Mikha CH. Kaunang, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, Volume 5, Nomor 4, Lex Crimen 2016.

Muhammad Fandi Asnan dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari Pemilik Tanah Sebelumnya”, Volume 6, Nomor 1, Unes Law Review 2023.



Nur Azizah, “Peranan Camat dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah”, Volume 5, Nomor 1, Jurnal MSDM 2018.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Volume 16, Nomor 1, Jurnal Imu Hukum 2020.

Sanindia Septia Kisedi Putri, “Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Volume 2, Nomor 2, Notary Jurnal 2022.

E. Internet

PAN RB, Standar Pelayanan Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah, dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik> diakses tanggal 17 September 2024.

